

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Semarang, Rabu (7 Juni 2017) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penyerahan dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Hery Subowo, SE., MPM., Ak., CA., CIA., CFE, disaksikan Anggota V BPK RI Ir. Isma Yatun, M.T. dan Tortama V DR. Bambang Pamungkas, MBA., CA., Ak. Acara dilaksanakan mulai pukul 15.30 WIB di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, 24 Ketua DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan 24 Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang menerima penyerahan LHP LKPD TA.2016.

Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, telah terjadi peningkatan tata kelola keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2015, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD TA 2014 untuk 12 (dua belas) Pemerintah Daerah dan untuk 24 (duapuluh empat) Pemerintah Daerah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kemudian pada tahun 2016, sebanyak 21 (dua puluh satu) Pemerintah Daerah mendapat opini WTP atas LKPD TA 2015 dan 15 (lima belas) Pemerintah Daerah memperoleh opini WDP. Pada tahun 2017, BPK memberikan opini LKPD TA.2016 yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) Pemda memperoleh opini WTP sementara sisanya sebanyak empat Pemda masih mendapatkan opini WDP dan satu Pemda masih dalam proses penyelesaian laporan.

Dengan demikian terdapat peningkatan signifikan Pemerintah Daerah yang memperoleh opini WTP dan penurunan signifikan Pemerintah Daerah yang memperoleh opini WDP.

Upaya yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual, baik sistem akuntansi maupun penyajian LKPD, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi LKPD se-Jawa Tengah dalam 2 (dua) tahun terakhir, antara lain:

1. **Komunikasi yang intens dengan seluruh stakeholder**, yaitu: (a) Rapat koordinasi persiapan audit LKPD antara BPK dan Inspektorat Pemda; (b) Rapat koordinasi pimpinan BPK dan Kepala Daerah se-Jawa Tengah tentang pentingnya akuntabilitas dan transparan keuangan daerah; (c) Pertemuan konsultatif DPRD dengan BPK terkait hasil pemeriksaan sebagai bahan tindak lanjut dan pengawasan kepada SKPD terkait; (d) Diskusi Intensif progress Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dengan melibatkan Kepala Daerah terkait pendampingan oleh BPKP dalam implementasi aplikasi SIMDA dan SIMBADA serta pembentukan tim lintas SKPD maupun keterlibatan kepala daerah dalam membenahan aset; (e) Diseminasi hasil pemeriksaan dalam forum Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) yang diselenggarakan APIP; (f) Penyusunan dan diseminasi Buku Kompilasi Hasil Pemeriksaan LKPD dan Manajemen Aset sebagai pembelajaran bagi Pemda yang masih memperoleh WDP untuk LKPD nya; (g) Kegiatan *Knowledge sharing* metodologi dan mekanisme reviu Inspektorat atas LKPD *unaudited*.
2. **Pemeriksaan dukungan terhadap LKPD**, yaitu: (a) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu untuk Manajemen Aset pada Pemda yang masih memperoleh opini WDP untuk LKPD nya; (b) Pemeriksaan kinerja kesiapan Pemda dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual; (c) Pemeriksaan Belanja Modal untuk Pemda-Pemda yang mengelola anggaran signifikan.
3. **Persiapan dan Pelaksanaan audit LKPD yang efektif**, yaitu: (a) Workshop persiapan audit LKPD bagi auditor terkait Kebijakan Audit, Panduan LKPD dan Aplikasi SIMDA; (b) Penerapan kebijakan pemeriksaan dalam berbagai perangkat lunak audit keuangan terkait substansi dan metodologi; (c) Komunikasi audit lebih dini atas masalah yang ditemukan di lapangan untuk mendapat klarifikasi komprehensif dari pejabat kompeten; (d) Penerapan

Informasi lebih lanjut: Subbagian Humas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Telepon : 024-8660825, 8660826; Fax : 024-8660884

Website : semarang.bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



prosedur penelusuran yang ekstensif atas angka aset tetap pada LKPD, CaLK, KIB, hingga ke fisik aset tetap baik dengan data yang bersumber dari sistem maupun data pendukung lainnya.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah telah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel dan juga memberi manfaat lebih, baik bagi para pemangku kepentingan, para pengguna, maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Hal ini direfleksikan dengan disajikannya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mulai TA 2015 ke dalam 7 (tujuh) laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibanding dengan sebelum penerapan akrual yang hanya 4 (empat) laporan. Disamping itu Pemda juga telah melakukan berbagai langkah pembenahan aset tetap yang menjadi penyebab pengecualian dalam opini WDP atau LKPD sebelumnya.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan. Permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersama antara lain (1) **Permasalahan aset tetap**, diantaranya belum seluruh tanah Pemda dimiliki, dikuasai, dan bersertifikat, serta penyerahan aset SMA/SMK, terminal dan aset lainnya sesuai amanat UU 23/2015 belum berjalan lancar, belum seluruhnya diserahkan, dan dicatat memadai sesuai SAP baik di Propinsi maupun Kabupaten/Kota; (2) **Permasalahan belanja**, diantaranya Bansos, Hibah dan Bankeu belum/terlambat dipertanggungjawabkan oleh penerima bansos/hibah tanpa dikenakan sanksi yg tegas, serta kekurangan volume fisik pekerjaan konstruksi dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; (3) **Permasalahan pendapatan**, diantaranya pendapatan belum/terlambat disetor ke kas daerah atau digunakan langsung untuk kepentingan operasional, serta pendapatan dari pemanfaatan aset belum dikelola secara memadai bagi keuntungan Pemda.

Untuk itu diharapkan rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dapat segera ditindaklanjuti. Tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dicerminkan pula dari seberapa jauh rekomendasi hasil pemeriksaan telah diselesaikan

BPK mengucapkan terima kasih atas kerja sama Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Kami berharap agar Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memanfaatkan serta menggunakan informasi yang kami sampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut. Kemudian juga diucapkan terima kasih kepada Bupati dan Walikota beserta jajarannya atas dukungan dan kerja sama yang diberikan selama proses pemeriksaan berlangsung. Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.